EFEKTIVITAS PENCAIRAN DANA SPJ DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

GILANG SETIAWAN

07011281722085

Konsentrasi Keuangan Negara

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENCAIRAN DANA SPJ DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

SKRIPSI

Oleh: GILANG SETIAWAN

07011281722085

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Agustus 2022

Pembimbing 1

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

NIP. 197705122003121003

Pembimbing 2

Dwi Mirani, S.IP., M.Si.

NIP. 198106082008122002

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENCAIRAN DANA SPJ DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

Skripsi
Oleh :
Gilang Setiawan
NIM 07011281722085

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 15 September 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Pembimbing :	Tanda Tangan
1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si NIP 197705122003121003	
2. Dwi Mirani, S.IP., M,Si NIP 198106082008122002	

Penguji :	
1. Drs. Gatot Budiarto, MS NIP 195806091984031002	
2. Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si NIP 198801272019031005	

Mengetahui,

Dekan FISIP	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Prof. Dr. Alfitri, M.Si	**Dr.M.Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**
NIP 196601221990031004	NIP 196911101994011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Setiawan

NIM : 07011281722085

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Judul Skripsi : Efektivitas Pencairan Dana SPJ di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana/Ahli Madya, baik yang ada di /Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini yang dibuat adalah serangkaian gagasan, rumusan dan penelitian yang telah saya buat sendiri, tanpa bantuan pihak lain terkecuali arahan tim pembimbing dan penguji.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 13 Juli 2022

[illegible]uat pernyataan,

METERAI TEMPEL

[illegible]C2BAKX055052761

Gilang Setiawan

NIM. 07011281722085

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kepada-Mu ya Allah, aku berseru, dan kepada-Mu aku memohon.

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”.

(Umar bin Khatab)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah, berkat rahmat dan karunia Nya penulis diberikan kekuatan serta keteguhan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Derajat Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Publik. Skripsi ini berjudul "Efektivitas Pencairan Dana SPJ di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019"

Dalam menyelesaikan skripsi, penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, masukan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penyusunan skripsi. Kedua Orang Tua yang selalu mendukung dan selalu sabar menunggu dan menjadi penyemangat terbaik yang tak pernah letih memberikan dukungan secara moril maupun material selama perkuliahan khususnya selama menyusun skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Dra. Martina M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
5. Bapak Sofyan Effendi S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dwi Mirani S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Hj. Sixta Lusanti SE., MM selaku Kasubag Keuangan di Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Ibu Linda Farid, SS, M.Si selaku Bendahara Pengeluaran di Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Ibu Desak Nyoman Indah FS, SE selaku Verifikator di Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian skripsi ini, khususnya untuk Nyonya.
11. *Last but not least, I wanna thank me for believing me, I wanna thank for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all time*.

Semoga Allah senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sudah berusaha maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Apabila masih ada kekeliruan dalam penulisannya, penulis menerima kritik yang membangun. Atas segala perhatian penulis mengucapkan terima kasih.

Palembang, 2 Agustus 2022

Gilang Setiawan

NIM. 07011281722085

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the disbursement of SPJ funds at Badan Pendapatan Daerah of South Sumatra Province in 2019. The theory used is the Effectiveness Theory from Richard M. Steers and the effectiveness measurement is associated with UU no. 33 of 2004 concerning Regional Financial Balance. With 3 dimensions, namely input, process, and output. The type of research used is descriptive qualitative with interview and documentation data collection techniques. Data analysis and reduction techniques, data presentation and conclusion. The results of this study show that of the three dimensions in this study, there is one dimension that can be said to be quite effective, namely input and two other dimensions that cannot be said to be effective, namely process and output. So it can be concluded that the effectiveness of the disbursement of SPJ funds at Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) of South Sumatra Province in 2019 can be said to have not been effective because processes and outputs that have not been maximized according to the results of research and direct interviews with informants who done by the author.

Keywords: Effectiveness, SPJ, Badan Pendapatan Daerah, South Sumatera Province

Advisor I	Advisor II
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.	**Dwi Mirani, S.IP., M.Si.**
NIP. 197705122003121003	**NIP. 198106082008122002**

Palembang, November 2022

Chairman of Department of Public Administration

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pencairan dana SPJ di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Teori yang digunakan yaitu Teori Efektivitas dari Richard M. Steers dan pengukuran efektivitas dikaitkan dengan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Dengan 3 dimensi yaitu *input*, *process*, dan *output*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan dari ketiga dimensi pada penelitian ini, terdapat satu dimensi yang dapat dikatakan cukup efektif yaitu input dan dua dimensi lainnya belum dapat dikatakan efektif yaitu *process* (proses) dan *output* (keluaran). Maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas pencairan dana SPJ di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 dapat dikatakan belum efektif karena memiliki *process* (proses) dan *output* (keluaran) program yang belum maksimal sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara langsung dengan informan yang dilakukan oleh penulis.

Kata Kunci: Efektivitas, SPJ, Badan Pendapatan Daerah, Provinsi Sumatera Selatan

Pembimbing I	Pembimbing II
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.	**Dwi Mirani, S.IP., M.Si.**
NIP. 197705122003121003	**NIP. 198106082008122002**

Palembang, November 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJUAN PUSTAKA **10**

A. Landasan Teori 10
   1. Keuangan Negara 10
   2. Keuangan Daerah 10
   3. Efektivitas 11
   4. Pendapatan Asli Daerah 18
   5. Pengelolaan 19
   6. Surat Pertanggung Jawaban 20
B. Penelitian Terdahulu 20
C. Kerangka Pemikiran 23

BAB III METODE PENELITIAN **24**

A. Jenis Penelitian 24
B. Definisi Konsep 24
C. Fokus Penelitian 26
D. Data dan Sumber Data 26
E. Penentuan Informan 27
F. Teknik Pengumpulan Data 28
G. Teknik Analisis Data 29
H. Teknik Keabsahan Data 30
I. Lokasi Penelitian 30
J. Sistematika Penulisan 31

BAB IV PEMBAHASAN **32**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....32
1. Letak Geografis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan 32
2. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan 34
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan.....35
4. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan 35
5. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan 36
B. Hasil dan Pembahasan Efektivitas Pencairan Dana SPJ di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 43
1. Analisis Masukan (*Input*) dalam proses pencairan dana SPJ di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.....44
2. Analisis Proses (*Process*) Pencairan dana SPJ di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 50
3. Analisis Keluaran (*Output*) Pencairan Dana SPJ di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.....56

BAB V PENUTUP 62

A. Kesimpulan.....62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN 69

‘

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Dokumen Penerimaan Pencairan Dana Surat Pertanggungjawaban 4
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....6
3. Penelitian Terdahulu.....21
4. Fokus Penelitian 26
5. Daftar Pegawai Pelaksana Pencairan Dana SPJ Pengeluaran.....46
6. Kelengkapan Sarana dan Prasarana di Ruang Kerja Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....47
7. Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis Bidang Palembang 1.....48
8. Matriks Temuan Penelitian.....60
9. Matriks Penelitian Kualitatif 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Pola Dasar Sebuah Model Sistem Terbuka menurut Richard M. Steers 17
2. Pengukuran Efektivitas menurut Mahmud 18
3. Kerangka Pemikiran 23
4. Struktur Organisasi 43
5. Dokumentasi SPJ yang Tidak Lolos Verifikasi 52
6. Dokumentasi Proses verifikasi data serta kelayakan SPJ di BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan 53
7. Dokumentasi Bersama Verifikator SPJ di BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan 55
10. Pola Proses Pencairan Dana SPJ 56

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Singkatan

ASN : Aparatur Sipil Negara
BAPENDA : Badan Pendapatan Daerah
Kabid : Kepala Bidang
Kasubag : Kepala Sub Bagian
No : Nomor
PAD : Pendapatan Asli Daerah
Perda : Peraturan Daerah
PDLL : Pendapatan Lain-lain
PNS : Pegawai Negeri Sipil
PP : Peraturan Pemerintah
SDM : Sumber Daya Manusia
SOP : Standar Operasional Prosedur
SPJ : Surat Pertanggungjawaban
SPPD : Surat Perintah Perjalanan Dinas
UPTB : Unit Pelaksana Teknis Bidang
UU : Undang-undang

Istilah

Approach : berarti pendekatan atau mendekati
Feedback : berarti umpan balik yang merupakan respon yang disampaikan oleh penerima
Finance : istilah yang menggambarkan terkait dengan parbankan, utang, kredit, pasar modal, uang, dan investasi
Input : berarti masukan secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk dapat terjadinya keluaran (*output*)
Manage : berarti mengatur, mengelola, dan mengendalikan sesuatu
Goals : dapat diartikan sebagai tujuan atau keinginan yang ingin dicapai
System : adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau \ variabel yang teroganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu
Skills : berarti keterampilan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu
Staff : dapat diartikan sebagai unsur pembantu pimpinan yang melakukan sebagian

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pimpinan

Values : adalah nilai yang menentukan harga atau biaya atau juga dapat disebut aset yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan suatu sistem atau paradigma dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralisasi adalah sebuh bentuk untuk terwujudnya *good governance.* Pada waktu dahulu kekuasaan masih dipegang secara terpusat artinya setiap daerah bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, untuk mengurangi rasa ketergantungan dan menjadikan setiap daerah berdaya sehingga dapat berkembang dengan kualitasnya masing-masing maka diberikanlah sebuah otonomi daerah yang memiliki tujuan agar daerah dapat meregulasi dan menyenggarakan pemerintahan sesuai dengan daerahnya masing-masing namun tujuan akhir tetap untuk memberikan layanan yang baik pada masyarakatnya.

Pada UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan UU mengenai otonomi daerah. Sedangkan UU No. 33 Tahun 2004 mengatur tentang perimbangan keuangan di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Adapun maksud dikeluarkannya UU tersebut dikarenakan penyerahan sistem dari sentral menuju desentral tentunya faktor keuangan juga beralih wewenang pengelolaan dipegang oleh daerah tidak lagi pusat. Agar setiap daerah mampu melakukan tata kelola uang kas nya sendiri secara maksimal. Dibuatnya UU No.33 Tahun 2004 untuk memberikan konsiderasi dukungan secara penuh kepada daerah untuk mengelola uang kas nya sendiri bersumber pada pembiayaan kas daerah yang berasal dari desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Adapun sistem keungannya antara pusat dan daerah diatur berdasar pada tingkatan pemerintah dalam membagi kewenangan, tupoksi, dan tanggung jawab.

Adanya laporan keuangan dalan sektor publik memiliki tujuan sebagai bentuk informasi mengenai alokasi dan kehunaan sumber keuangan yang dilakuka secara rinci sehingga dapat diketahui aktivitas aliran dana dan kebutuhan kas. Selain itu, dapat sebagai bahan evaluasi dari setiap instansi yang menggunakan kas daerah untuk bertanggung jawab dan berkomitmen penuh terhadap kondisi keuangan dan dipergunakan untuk apa saja sehingga dapat terlihat adanya biaya, efisiensi dan pencapaian tujuan yang ingin dilakukan dengan sumber daya kas yang telah digunakan (Bastian, 2010: 297).

Surat ialah alat komunikasi yang dapat digunakan dalam bentuk tulisan dan menghubungkan pihak satu dengan pihak lainnya Pratama (1997:1). Menurut Sugiarto (2005:2), surat merupakan sebuah sarana komunikasi yang menggunakan bahasa tulis dalam pemnyampaian informasinya dari seseorang untuk orang lainnya. Sedangkan menurut KBBI, arti surat ialah kertas atau secarik kertas yang berisikan keterangan tertentu.

Ditinjau dari bentuk surat dikelompokkan dalam bentuk surat berbentuk pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Namun dari pemakaian maka surat terdiri dari surat pribadi, resmi, dan dinas. Hal ini menjadikan surat memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda tergantung konteks pemakaian.

Surat dinas dapat disebut juga surat resmi, hal ini dikarenakan surat dinas ialah surat sah yang berasal dan ditetapkan oleh pemerintah Sudaryono (1983: 34). Pada KBBI surat dinas memiliki artian ialah surat yang dikirim oleh pemerintah tanpa pungutan biaya. Ringkasnya surat dinas ialah surat yang menjadi alat komunikasi yang sah dibuat oleh sebuah instansi lembaga pemerintahan. Adapun ciri dari surat dinas ialah terdapat kop surat di atas, bahasa yang digunakan di surat adalah bahasa resmi, mempunyai nomor surat, dilengkapi stempel atau cap instansi.

Surat perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan sebuah bukti penugasan dari sebuah instansi untuk anggotanya dalam melakukan perjalan dinas yang berhubungan dengan pekerjaan. SPPD dianggap sebagai surat izin sehingga karyawan bisa melakukan dinas keluar dan tidak sedang bekerja datang ke kantor. Diperlukan bukti perjalanan kerja sehingga memudahkan pada saat proses pelaporan dan melakukan pekerjaan yang ditugaskan. SPPD ini dapat dijadikan bukti bawa anggota atau karyawan tersebut telah diutus oleh perusahaan atau atasan untuk melakukan pekerjaan diluar dengan telah ditetapkannya jangka waktu tertentu.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah berkas administrasi sebagai sebuah bukti terealisasinya kegiatan yang dilakukan baik yang bersifat secara teknis maupun khusus. Surat pertanggungjawaban digolongkan sebagai surat resmi, merupakan komponen penting dalam proses penatausahaan keuangan. Dalam penggunaannya khususnya di instansi pemerintahan, dibuatnya SPJ sebagai bentuk pelaporan dari lengkapnya sistem administrasi yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah laporan realisasi hasil kegiatan dari melakukan pekerjaan di luar.

Standar proses pelaksanaan pencairan dana surat pertanggungjawaban di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan disebutkan bahwa pencairan dana surat pertanggungjawaban terbagi menjadi dua bagian yaitu, pencairan dana dibawah nominal sepuluh juta rupiah dan pencairan dana di atas nominal sepuluh juta rupiah. Pada proses pencairan dana yang diajukan masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagai pihak pertama pengguna anggaran kapada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun, yang berarti dilakukan empat kali proses pencairan untuk setiap UPTB dalam satu tahun.

Pada penelitian ini, surat pertanggungjawaban yang diteliti oleh penulis berfokus pada pencairan dana SPJ. Berikut tabel SPJ pada tahun 2019 :

Tabel 1 Dokumen Penerimaan Pencairan Dana Surat Pertanggungjawaban

Bulan	SPJ Masuk	SPJ Diterima	SPJ Direvisi	Persentase
Januari	109	88	21	80,73%
Februari				
Maret				
April	96	75	26	78,13%
Mei				
Juni				
Juli	105	92	13	87,62%
Agustus				
September				
Oktober	112	98	14	87,50%
November				
Desember				

Sumber : diolah penulis berdasarkan data surat masuk di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel 2019

Pada Tabel 1 ditemukan jumlah dari SPJ yang masuk setiap Triwulannya tidak memiliki jumlah yang tetap, akan tetapi jumlah SPJ yang diterima belum diserap dengan maksimal sehingga banyak SPJ yang perlu direvisi kembali agar diterima dan selanjutnya dilakukan proses pencairan dana dari SPJ tersebut. Penyebab dari kondisi ini yaitu komunikasi yang belum terlaksana dengan baik antara pihak Unit Pelaksana Teknis Badan dan pihak Badan Pendapatan Daerah serta kualitas sumber daya manusia yang kurang produktif dan berakibat pada kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam proses pembuatan surat pertanggungjawaban maupun proses penyerahan surat pertanggungjawaban kepada pihak pertama.

Untuk mengetahui anggaran tahun 2019 dan realisasi anggaran tahun 2019 berjalan dengan maksimal diperlukan peninjauan terhadap administrasi kumpulan *report* realiasis terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini dapat dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:206) pada statistik dilakukan analisis deskriptif

dimaksudkan agar dapat melakukan analisa data sehingga dapat menggambarkan data yang telah dikumpulkan seapa adanya tanpa ada maksud untuk melakukan generalisasi. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$\textbf{Rasio Efektivitas} = \frac{\textbf{Realisai Penerimaan PAD}}{\textbf{Target Penerimaan PAD}} \times \mathbf{100}\%$$

Sumber: Mahsun (2013).

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka penerimaan PAD dikatakan sangat efektif
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka penerimaan PAD dikatakan efektif
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka penerimaan PAD dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka penerimaan PAD dikatakan kurang efektif
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka penerimaan PAD dikatakan tidak efektif

Adapun pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan melakukan perbandingan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja.

$$\textbf{Rasio Efisiensi} = \frac{\textbf{Realisasi Belanja}}{\textbf{Anggaran Belanja}} \times \mathbf{100}\%$$

Sumber: Mahsun (2013).

Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD bagi kemendagri ialah dilihat berdasrkan pada 5 kategori yaitu anggaran belanja dinyatakan efisien bila mencapai 60%-80%. Dinyatakan cukup efisien bila termasuk dalam kategori angka 80%-90%. Dikatakan kurang efiesien apabila anggaran belanja tersebut berada di 90%-100%. Dan yang terakhir dapat dikatakan tidak efisien bila perbandingan mencapai lebih dari 100%.

Berikut Tabel 2 yang memberikan uraian realisasi anggaran tahun 2019 yaitu:

Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	KRITERIA
PENDAPATAN	3.071.784.718.796,00	3.224.422.159.134,83	104,97%	Sangat Efektif
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.071.784.718.796,00	3.224.422.159.134,83	104,97%	Sangat Efektif
Pendapatan Pajak Daerah	3.071.784.718.796,00	3.145.558.634.339,38	102,40%	Sangat Efektif
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	78.863.524.795,45	0,00%	Sangat Efektif
BELANJA	169.989.889.500,00	152.323.260.466,00	89,61%	Cukup Efisien
BELANJA OPERASI	162.849.889.500,00	145.508.819.893,00	89,35%	Cukup Efisien
Belanja Pagawai	138.215.860.000,00	125.126.777.335,00	90,56%	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	24.634.029.500,00	20.346.042.558,00	82,59%	Cukup Efisien
BELANJA MODAL	7.140.000.000,00	6.814.440.573,00	95,44%	Kurang Efisien
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.740.000.000,00	6.461.413.573,00	95,87%	Kurang Efisien
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	196.927.000,00	98,46%	Kurang Efisien
Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	156.100.000,00	78,05%	Efisien

Sumber : diolah penulis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 2 ditemukan data pada tahun anggaran 2019 pada periode tersebut efektivitas penerimaan PAD memiliki sifat yang tetap. Selain itu di tahun yang sama badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan mampu mengerahkan penerimaan pendapatan asli daerah sebanyak 104,97% hal ini selaras dengan target yang ada di rasio efektivitas yaitu di atas 100%. Tingkat efisiensi anggaran belanja pada Bapenda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 mencapai rata-rata 89,99% dan ketidakefisienan paling tinggi dari pelaksanaan anggaran belanja di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan terdapat pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Kekeliruan ini perlu diperhatikan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dari banyaknya SPJ yang belum sesuai dengan standar ketentuan dan harus di revisi, baik itu komunikasi antar pihak serta produktivitas dari pegawai. Berdasarkan data diatas, Bapenda Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan peningkatan keefektivitasan penerimaan SPJ yang telah diajukan dari pihak UPTB agar proses penerimaan SPJ dapat berjalan dengan maksimal demi tercapainya realisasi anggaran belanja operasional dan belanja bangunan UPTB setiap tahunnya dan pengoptimalan kinerja dari para pegawai.

Guna melakasanakan *"Efektivitas Pencairan dana SPJ di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan"* agar berjalan secara maksimal demi mengoptimalkan proses pencairan dana kebutuhan masing-masing UPTB Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan setiap kegiatannya, perlu dilaksanakannya prosedur yang tepat dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana keperluan masing-masing UPTB. Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan atau membatasi penelitian untuk transaksi di bawah nominal Sepuluh Juta Rupiah yang di tangani oleh Sub Bagian keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang maka dirumuskan rumusan masalah yaitu "Bagaimana Efektivitas Pencairan Dana SPJ di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pencairan dana SPJ di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dijabarkan dan perlu dicapai, maka peneliti mengharapkan adanya kebermanfaatan dari dilakukannya penelitian ini yaitu memberi manfaat bagi aparatur sipil negara dan pembaca:

1. Manfaat Teoritis

   a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ASN yang terlibat dalam proses pencairan dana SPJ sesuai dengan tuntutan dan cara pelaksanaan yang benar, sehingga memudahkan ASN itu sendiri dalam pencairan dana SPJ di Badan Pendapatan Daerah.

   b. Memberikan sumbangan kajian keilmuan berkaitan dengan ilmu administrasi keuangan, yaitu membuat metode efektivitas SPJ di Badan Pendapatan Daerah.

   c. Sebagai sebuah referensi dan menambah khazanah ilmu pengetahuan penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki kolerasi dengan peningkatan efektivitas pencairan dana SPJ di Badan Pendapatan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih buah pikiran, menambah informasi, dan ilmu baru mengenai pencairan dana surat pertanggungjawaban yang lebih luas kepada pihak yang memiliki wewenang di bidangnya dan belum mengetahui apa saja yang dimaksudkan dan apa yang mempengaruhi pencairan itu sendiri sebagai berikut :

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah wawasan dan pengalaman mengenai cara meningkatkan efektivitas SPJ di Badan Pendapatan Daerah.

b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi informasi dan gagasan wawasan baru mengenai pencairan dana surat pertanggungjawaban sehingga efektivitas SPJ pencairan dana meningkat.

c. Menentukan metode dan media yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pencairan dana SPJ bagi Badan Pendapatan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Agus Sugiarto, Teguh. 2005. *Manajemen Kearsipan*. Yogyakarta: Gava Media.

Ainur, Intan. 2021. Pengelolaan SPJ Pengeluaran Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Daerah*. Universitas.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta:

Erlangga.

Basna,Nimrod. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Keterlambatan Surat PertanggungJawaban Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah.* Universitas Cendrawasih.

Gibson, J.L, Ivancevich, J.M dan Donelly, J.Jr, 1984. *Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur dan Proses*. Edisi Keempat. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Daerah : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Lubis, Husain. 2007. *Efektivitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andy Offset.

Munandar, M. 2010. Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja. Yogyakarta: BPFE.

Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

M. Steers, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga

Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI

Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. yogyakarta: UPP AMP YKPN

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Pasalong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Peters, Waterman. 1997. *The Unended Quest for Excellence. Journal the Academy of Management Executive Vol. 1, No. 2, pp. 91-98*. New york: Publish Management

Singarimbun. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES

Sudaryono. 1983. *Surat Menyurat Dalam Bahasa Indonesia*. Bandung.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Republik Indonesia. 1996. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 *Tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah,* Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,* Jakarta.